

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Profil Singkat Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2020**

##### **1. Bank NTB Syariah**

Bank NTB Syariah, pertama kali didirikan sebagai BPD NTB dan merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama dengan Pemerintah Kabupaten Kota se-Nusa Tenggara Barat. Akibat perkembangan usaha dan perubahan regulasi tentang BUMD yang bergerak di bidang perbankan, BPD NTB melakukan beberapa langkah strategis yang salah satunya adalah Rencana konversi PT Bank NTB menjadi Bank NTB Syariah.

Konversi tersebut ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 08 Tahun 2018 tentang konversi PT Bank NTB menjadi Bank NTB Syariah dan disahkan dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0017252.AH.01.02 Tanggal 23 Agustus 2018 dan memperoleh ijin operasional sebagai Bank Umum Syariah dari Otoritas Jasa Keuangan Keputusan Anggota Dewan Komisioner No: KEP-145/D.03/2018 Tanggal 4 September 2018 dan secara resmi beroperasi pada seluruh Kantor Cabang pada tanggal 24 September 2018.<sup>147</sup>

##### **2. Bank Muamalat Indonesia**

Bank Muamalat Indonesia berdiri pada 1 November 1991 dan beroperasi pada 1 Mei 1992 atau 27 Syawal 1412 H. BMI didirikan atas gagasan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan pengusaha muslim yang kemudian mendapat dukungan dari Pemerintah Republik Indonesia.

---

<sup>147</sup> Laporan Keuangan Tahunan Bank NTB Syariah, Profil Perusahaan – Riwayat Singkat Perusahaan, 2020, h. 57-58

Bank Muamalat merupakan bank resmi yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah pertama di Indonesia. Kemudian pada 27 Oktober 1994, BMI memperoleh izin sebagai Bank Devisa setelah setahun sebelumnya terdaftar sebagai perusahaan publik yang tidak *listing* di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Pada 2009, Bank Muamalat mendapatkan izin untuk membuka kantor cabang di Kuala Lumpur, Malaysia dan menjadi bank pertama di Indonesia serta satu-satunya yang mewujudkan ekspansi bisnis di Malaysia. Hingga saat ini, Bank telah memiliki 249 kantor layanan termasuk 1 (satu) kantor cabang di Malaysia. Operasional Bank juga didukung oleh jaringan layanan yang luas berupa 619 unit ATM Muamalat, 120.000 jaringan ATM Bersama dan ATM Prima, 55 unit Mobil Kas Keliling.<sup>148</sup>

### 3. BRISyariah

Sejarah pendirian PT Bank BRISyariah Tbk (selanjutnya disebut BRISyariah atau Bank) tidak lepas dari akuisisi yang dilakukan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007. Setelah mendapatkan izin usaha dari Bank Indonesia melalui surat No.10/67/KEP.GBI/DPG/2008 pada 16 Oktober 2008 BRISyariah resmi beroperasi pada 17 November 2008 dengan nama PT Bank Brisyariah dan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah islam.

Pada 19 Desember 2008, Unit Usaha Syariah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk melebur ke dalam PT Bank BRISyariah. Proses spin off tersebut berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009 dengan penandatanganan yang dilakukan oleh Sofyan Basir selaku Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan Ventje Rahardjo selaku Direktur Utama PT Bank BRISyariah.

---

<sup>148</sup> Laporan Keuangan Tahunan Bank Muamalat Indonesia, Profil Perusahaan – Riwayat Singkat, 2020, h. 72-73

BRISyariah melihat potensi besar pada segmen perbankan syariah. Dengan niat untuk menghadirkan bisnis keuangan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip luhur perbankan syariah, Bank berkomitmen untuk menghadirkan produk serta layanan terbaik yang menenteramkan, untuk pertumbuhan BRISyariah yang positif.<sup>149</sup>

#### 4. Bank Jabar Banten Syariah

Awal berdirinya BJB Syariah adalah sebagai Divisi/Unit Usaha Syariah oleh PT PBD Jawa Barat dan Banten Tbk pada tanggal 20 Mei 2000 untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan jasa perbankan syariah yang sudah mulai tumbuh. Pasca beroperasi selama 10 (sepuluh) tahun dan mendapat persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk, Divisi/Unit Usaha Syariah tersebut bertransformasi menjadi sebuah Bank Umum Syariah yang secara resmi berdiri pada tanggal 15 Januari 2010 berdasarkan Akta Pendirian PT Bank Jabar Banten Syariah nomor 4 tanggal 15 Januari 2010 yang telah disetujui dan disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-04317.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 26 Januari 2010.

Secara resmi bank bjb syariah berdiri pada tanggal 15 Januari 2010 berdasarkan Akta Pendirian PT Bank Jabar Banten Syariah Nomor 4 tanggal 15 Januari 2010 dan mulai beroperasi pada tanggal 6 Mei 2010 berdasarkan SK Gubernur BI No. 12/35/KEP.GBI/2010 tanggal 30 April 2010 tentang Pemberian Izin Usaha PT Bank Jabar Banten Syariah.<sup>150</sup>

---

<sup>149</sup> Laporan Keuangan Tahunan Bank BRISyariah, Profil Perusahaan – Sekilas BRISyariah, 2020, h. 46-47

<sup>150</sup> Laporan Keuangan Tahunan Bank BJB Syariah, Profil Perusahaan – Riwayat Singkat Perusahaan, 2020, h. 39-40

## 5. BNI Syariah

PT Bank BNI Syariah didirikan pada 29 April 2000 yang ditandainya dengan beroperasinya Unit Usaha Syariah (UUS) Bank BNI. Pendirian Bank tak lepas dari visi besar Bank BNI dalam melihat potensi pengembangan ekonomi syariah, khususnya perbankan syariah di Indonesia yang merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia.

Sesuai dengan *Corporate Plan* UUS Bank BNI tahun 2003 ditetapkan bahwa status UUS bersifat temporer untuk kemudian dilakukan *spin off*. Terbitnya Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Peraturan Bank Indonesia No. 11/10/PBI/2009 tanggal 19 Maret 2009 tentang Pemisahan Unit Usaha Syariah dari Bank Konvensional menjadi landasan bagi Bank BNI untuk mempercepat proses *spin off*.

Pada tanggal 19 Juni 2010 BNI Syariah secara resmi beroperasi setelah sebelumnya mendapat Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 12/41/KEP.GBI/2010 tanggal 21 Mei 2010, setelah sebelumnya pendirian Perseroan telah ditetapkan berdasarkan Akta No.160 dan telah disahkan melalui Surat Keputusan Menteri Hukum & HAM No. AHU- 15574, AH.01.01 Tahun 2010, Tanggal 25 Maret 2010.<sup>151</sup>

## 6. Bank Mandiri Syariah

PT Bank Syariah Mandiri didirikan pertama kali dengan nama PT Bank Industri Nasional disingkat PT BINA atau disebut juga PT National Industrial Banking Corporation Ltd. Kemudian nama bank mengalami beberapa kali perubahan menjadi PT Bank Maritim Indonesia pada tanggal 29 April 1969, PT Bank Susila Bakti pada tanggal 1 Oktober 1974, PT Bank Syariah Sakinah Mandiri pada

---

<sup>151</sup>Laporan Keuangan Tahunan Bank BNI Syariah, Profil Perusahaan – Riwayat Singkat Perusahaan, 2020, h. 49

tangga 31 Oktober 2000 dan terakhir diubah menjadi PT Bank Syariah Mandiri. Selanjutnya Bank mendapatkan izin usaha dari Bank Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 1/24/KEP.GBI/1999 tanggal 25 Oktober 1999 sebagai bank umum berdasarkan prinsip syariah dan mulai beroperasi sejak tanggal 1 November 1999.<sup>152</sup>

#### 7. Bank Mega Syariah

Pada awalnya dikenal sebagai PT Bank Umum Tugu (Bank Tugu), yaitu Bank Umum yang didirikan pada 14 Juli 1990 kemudian diakuisisi oleh PT CT Corpora (d/h Para Group) melalui PT Mega Corpora (d/h PT Para Global Investindo) dan PT Para Rekan Investama pada 2001. Akuisisi ini diikuti dengan perubahan kegiatan usaha pada tanggal 27 Juli 2004 yang semula Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah dengan nama PT Bank Syariah Mega Indonesia (BSMI) serta dilakukan perubahan logo untuk meningkatkan citranya di masyarakat sebagai lembaga keuangan syariah yang terpercaya.

Pada tanggal 25 Agustus 2004, BSMI resmi beroperasi. Hampir tiga tahun kemudian, pada 7 November 2007, pemegang saham memutuskan untuk melakukan perubahan logo BSMI sehingga lebih menunjukkan identitas sebagai bagian dari grup Mega Corpora. Sejak 2 November 2010 hingga saat ini, bank dikenal sebagai PT Bank Mega Syariah.

Sejak 16 Oktober 2008, Bank Mega Syariah telah memperoleh izin untuk beroperasi sebagai bank devisa. Dengan status tersebut, bank dapat melakukan transaksi devisa dan terlibat dalam perdagangan internasional. Pada tahun 2018 Bank Mega Syariah telah ditunjuk sebagai Bank Penerimaan, Bank Penempatan dan Bank Mitra Investasi oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Selanjutnya

---

<sup>152</sup>Laporan Keuangan Tahunan Bank Syariah Mandiri, Profil Perusahaan – Riwayat Singkat Perusahaan, 2020, h. 69-70

di tahun 2019, BPKH mempercayakan Bank Mega Syariah untuk menjadi salah satu Bank Likuiditas yang menjadi partner BPKH selaku penanggung jawab pengelolaan dana haji di Indonesia.<sup>153</sup>

#### 8. Bank Panin Dubai Syariah

PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk semula bernama PT Bank Pasar Bersaudara Djaja. Perseroan telah beberapa kali melakukan perubahan nama, berturut-turut dimulai dengan nama PT Bank Bersaudara Djaja. Kemudian perseroan kembali berganti nama menjadi PT. Bank Harfa. Kemudian, nama tersebut kembali mengalami perubahan menjadi PT. Bank Panin Syariah berdasarkan Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa No. 1 tanggal 3 Agustus 2009, yang dibuat oleh Drs. Bambang Tedjo Anggono Budi, S.H., M.Kn., pengganti dari Sutjipto, S.H., notaris di Jakarta. Perubahan tersebut sehubungan perubahan kegiatan usaha Perseroan dari semula menjalankan kegiatan usaha perbankan konvensional menjadi kegiatan usaha perbankan Syariah dengan prinsip bagi hasil berdasarkan syariat Islam.

Sehubungan dengan perubahan status Perseroan dari semula perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka, nama PT Bank Panin Syariah selanjutnya berubah menjadi PT Bank Panin Syariah Tbk berdasarkan Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa No. 71 tanggal 19 Juni 2013 yang dibuat oleh Fathiah Helmi, S.H., notaris di Jakarta. Pada 2016, nama PT Bank Panin Syariah, Tbk diubah menjadi PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk sehubungan dengan masuknya Dubai Islamic Bank PJSC sebagai salah satu Pemegang Saham Pengendali.<sup>154</sup>

---

<sup>153</sup>Laporan Keuangan Tahunan Bank Mega Syariah, Profil Perusahaan – Riwayat Singkat Perusahaan, 2020, h. 39

<sup>154</sup>Laporan Keuangan Tahunan Bank Panin Dubai Syariah, Profil Perusahaan – Sekilas Perusahaan, 2020, h. 38

## 9. Bank Bukopin Syariah

PT Bank Syariah Bukopin merupakan bank umum yang beroperasi dengan prinsip syariah. Pembentukan Bank Syariah Bukopin telah menempuh sejarah panjang selama 3 dekade, dimulai dengan berdirinya PT Bank Swansarindo Internasional pada tahun 1990 di Samarinda, Kalimantan Timur. dengan dasar hukum Akta nomor 102 tanggal 29 Juli 1990.

Periode 2001-2003 terjadi proses akuisisi Bank Swansarindo oleh Organisasi Muhammadiyah. Pada saat itu terjadi perubahan nama dari PT Bank Swansarindo Internasional menjadi PT Bank Persyarikatan Indonesia melalui Persetujuan dari Bank Indonesia nomor 5/4/KEP.DGS/2003 tanggal 24 Januari 2003 yang dituangkan ke dalam akta nomor 109 Tanggal 31 Januari 2003. Selanjutnya, pada tahun 2005 – 2008 PT Bank Persyarikatan Indonesia diakuisi oleh PT Bank KB Bukopin Tbk yang dilakukan secara bertahap. Perseroan beroperasi efektif per 9 Desember 2008, dimana Wakil Presiden RI periode 2004-2009 Jusuf Kalla yang meresmikan beroperasinya Bank Syariah Bukopin. Pada tahun 2009 dilakukan penggabungan Unit Usaha Syariah (UUS) PT Bank KB Bukopin Tbk ke dalam PT Bank Syariah Bukopin disetujui oleh Bank Indonesia melalui surat No. 11/842/DPbS tanggal 30 Juni 2009.<sup>155</sup>

## 10. Bank BCA Syariah

BCAS merupakan hasil konversi dari akuisisi PT Bank Central Asia Tbk (BCA) di tahun 2009 terhadap PT Bank Utama Internasional Bank (Bank UIB) yang beroperasi sebagai bank konvensional. Perubahan kegiatan usaha Bank dari bank konvensional menjadi Bank Umum Syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui Keputusan Gubernur BI No. 12/13/KEP. GBI/DpG/2010 tanggal 2

---

<sup>155</sup>Laporan Keuangan Tahunan Bank Syariah Bukopin, Profil Perusahaan – Riwayat Singkat Perusahaan, 2020, h. 51-52

Maret 2010. Dengan diperolehnya izin tersebut maka pada tanggal 5 April 2010 BCAS resmi beroperasi sebagai Bank Umum Syariah.

Adapun hingga akhir tahun 2020, BCAS telah melayani 106.356 nasabah pendanaan dan 12.334 nasabah pembiayaan melalui 69 jaringan cabang yang terdiri dari 14 Kantor Cabang (KC), 15 Kantor Cabang Pembantu (KCP), dan 40 Unit Layanan Syariah (ULS) yang tersebar di wilayah DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Bandung, Semarang, Solo, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Kudus, Palembang, Medan dan Banda Aceh. Selain jaringan BCAS, nasabah juga dilayani melalui 50 jaringan LSBU (Layanan Syariah Bank Umum) BCA yang tersebar di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur.<sup>156</sup>

#### 11. Bank Tabungan Pensiun Nasional Syariah

Pada 14 Juli 2014, BTPN Syariah resmi terdaftar sebagai Bank Umum Syariah ke-12 di Indonesia melalui pemisahan (*spin-off*) Unit Usaha Syariah dari PT Bank BTPN Tbk (dahulu bernama PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk) dan proses konversi PT Bank Sahabat Purba Danarta (BSPD). Sebagai satu-satunya bank syariah di Indonesia yang fokus memberikan pelayanan bagi pemberdayaan nasabah prasejahtera produktif dan mengembangkan keuangan inklusif, Bank senantiasa berupaya menambah nilai serta mengubah kehidupan setiap yang dilayaninya, selain dari menghasilkan kinerja keuangan yang baik.<sup>157</sup>

#### 12. Bank Aceh Syariah

Berdirinya Bank Aceh syariah diawali dengan hasil rapat RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) tanggal 25 Mei 2015 bahwa Bank Aceh melakukan perubahan kegiatan usaha dari sistem

---

<sup>156</sup>Laporan Keuangan Tahunan Bank BCA Syariah, Profil Perusahaan – Riwayat Singkat BCAS, 2020, h. 48

<sup>157</sup>Laporan Keuangan Tahunan Bank BTPN Syariah, Profil Perusahaan – Tentang BTPN Syariah, 2020, h. 47



konvensional menjadi sistem syariah seluruhnya. Maka proses konversi dimulai dengan tim konversi Bank Aceh dengan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Setelah melalui berbagai tahapan dan proses perizinan yang disyaratkan oleh OJK akhirnya Bank Aceh mendapatkan izin operasional konversi dari Dewan Komisioner OJK Pusat untuk perubahan kegiatan usaha dari sistem konvensional ke sistem syariah secara menyeluruh.

Perubahan sistem operasional dilaksanakan pada tanggal 19 September 2016 secara serentak pada seluruh jaringan kantor Bank Aceh. Dan sejak tanggal tersebut Bank Aceh telah dapat melayani seluruh nasabah dan masyarakat dengan sistem syariah murni mengutip Ketentuan PBI Nomor 11/15/PBI/2009.<sup>158</sup>

## **B. Pengungkapan *Sharia Compliance* Pada Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2020**

Pengungkapan *shariah compliance* bank umum syariah pada pelaksanaan GCG ini diteliti dengan menggunakan indikator-indikator yang telah dimuat sebelumnya. Indikator tersebut berjumlah 5 indikator dan 42 sub indikator, dimana indikatornya yaitu akad yang digunakan dalam pengumpulan dan penyaluran dana BUS, pengelolaan dana zakat BUS, keberadaan DPS sebagai pengarah syariah atas keseluruhan kegiatan operasional BUS, seluruh transaksi dan aktivitas ekonomi dilaporkan secara wajar sesuai dengan akuntansi syariah yang berlaku dan bisnis usaha yang dibiayai tidak bertentangan dengan syariah.

Adapun metode yang digunakan dalam mengungkapkan *shariah compliance* adalah metode *scoring*. Pada metode *scoring*, jika sub indikator diungkapkan dalam laporan maka akan dinilai 1 dan jika tidak diungkapkan dinilai 0. Kemudian hasil *scoring* akan dihitung dengan rumus indeks sebagai berikut:

---

<sup>158</sup>Laporan Keuangan Tahunan Bank Aceh Syariah, Profil Perusahaan – Riwayat Singkat Perusahaan, 2020, h. 61-64

$$\text{NP (\%)} = \frac{n1}{N0} \times 100\%$$

Keterangan :

- g. NP = indeks pengungkapan *sharia compliance* oleh bank syariah melalui laporan tahunannya;
- h. n = banyaknya item *sharia compliance* yang telah diungkapkan oleh BUS;
- i. N = banyaknya item yang seharusnya diungkapkan oleh BUS

Berikut pengungkapan *sharia compliance* pada pelaksanaan GCG bank umum syariah di Indonesia tahun 2020 berdasarkan indikator-indikator yang telah disebutkan diatas:

1. Indikator pertama : Akad yang digunakan dalam pengumpulan dan penyaluran dana BUS tahun 2020.

Indikator pertama ini berisi pengungkapan akad yang digunakan oleh bank umum syariah dalam produk dan jasanya. Terdapat beragam jenis akad yang dapat digunakan dalam produk bank umum syariah baik itu pengumpulan dana maupun penyaluran dana. Contoh akad yang digunakan dalam produk pengumpulan dana adalah *wadi'ah* yang sering digunakan dalam produk tabungan maupun giro dan *mudharabah* sering digunakan dalam produk tabungan dan deposito. Sementara untuk produk pembiayaan umumnya menggunakan akad *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *ijarah*, *ijarah muntahiya bittamlik* dan *qardh*.

Berikut pengungkapan *sharia compliance* pada pelaksanaan GCG bank umum syariah di Indonesia tahun 2020 berdasarkan indikator yang pertama.

**Tabel 4. 1 Indikator Pengungkapan *Sharia Compliance* Pertama**

No	Sub Indikator	Bank Umum Syariah											
		B N T B S	B M I	B R I S	B J B S	B N I S	B S M	B M S	B P D S	B S B	B C A S	B T P N S	B A S
1.	<b>Pengumpulan Dana;</b>												
	1. Giro (Akad <i>Wadiah</i> )	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	2. Tabungan (akad <i>wadi'ah</i> atau akad lain)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	3. Tabungan (akad <i>mudharabah</i> atau akad lain)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	4. Deposito (akad <i>mudharabah</i> )	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	<b>Penyaluran Dana:</b>												
	5. Jual beli (akad <i>murabahah</i> )	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	6. Pembiayaan bagi hasil ( <i>mudharabah</i> )	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1
7. Pembiayaan bagi hasil ( <i>musyarakah</i> )	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
8. Pembiayaan lain (sewa beli -akad <i>ijarah muntahiya</i> )	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	

	<i>bittamlik-</i> )												
	9. Pembiayaan lain (pinjaman dalam bentuk piutang - akad <i>qardh-</i> )	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	10. Pembiayaan lain (sewa menyewa - akad <i>ijarah-</i> )	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1
	<b>Total</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>7</b>	<b>10</b>

Sumber : data diolah, 2021

Berdasarkan indikator pertama, dapat dianalisis bahwa mayoritas bank umum syariah telah mengungkapkan akad yang digunakan dalam pengumpulan dan penyaluran dananya. Hanya 1 dari 12 bank umum syariah yang belum sepenuhnya mengungkapkan akad yang digunakan, yaitu BTPN Syariah dengan total pengungkapan indikator pertama berjumlah 7. Sementara sebelas (11) bank umum syariah yang telah sepenuhnya mengungkapkan akad yang digunakan adalah Bank NTB Syariah, Bank Muamalat Indonesia, BRISyariah, Bank Jabar Banten Syariah, BNI Syariah, Bank Syariah Mandiri, Bank Mega Syariah, Bank Panin Dubai Syariah, Bank Syariah Bukopin, BCA Syariah dan Bank Aceh Syariah dengan total pengungkapan yang sama yaitu 10.

Dalam laporan tahunannya, BTPN Syariah tidak memuat produk pembiayaan *mudharabah*, *ijarah muntahiya bittamlik* dan *ijarah*. Sub indikator tersebut yang membuat BTPN Syariah mendapatkan total pengungkapan terendah diantara bank syariah lainnya.

## 2. Indikator kedua : Pengelolaan dana zakat BUS tahun 2020

Pada indikator kedua ini, masing-masing BUS harus mengungkapkan hal-hal yang berkenaan dengan zakat, mulai dari metode, periode laporan,

sumber dana, penyaluran zakat, kenaikan dan penurunan zakat dan saldo awal serta akhir dana zakat dalam laporannya. Bank syariah dalam tujuan utamanya adalah mencapai falah (kesuksesan dunia dan akhirat) sehingga tidak hanya berorientasi pada profit namun juga kemashlatahan umat. Selain itu bank syariah juga memiliki fungsi sosial, sehingga bank syariah dapat mengumpulkan dan menyalurkan dana sosial seperti zakat. Dana zakat dapat bersumber dari perusahaan sendiri maupun dari pihak luar bank seperti nasabah.

Berikut pengungkapan *shariah compliance* pada pelaksanaan GCG bank umum syariah di Indonesia tahun 2020 berdasarkan indikator kedua.

**Tabel 4. 2Indikator Pengungkapan *Shariah Compliance* Kedua**

No	Sub Indikator	Bank Umum Syariah											
		B N T B S	B M I S	B R I S	B J B S	B N I S	B S M	B M S	B P D S	B S B	B C A S	B T P N S	B A S
2.	11. Metode pengakuan dan pengukuran dana zakat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	12. Periode laporan sumber dan penggunaan dana zakat	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1
	13. Sumber dana zakat	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1
	14. Penyaluran dan penggunaan dana zakat	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1

15. Kenaikan dan penurunan dana zakat	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1
16. Saldo awal dan akhir dana zakat	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1
<b>Total</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>

Sumber : data diolah, 2021

Berdasarkan tabel diatas, dapat dianalisis bahwa tidak ada BUS yang mengungkapkan keseluruhan sub indikator zakat yang ada. Terdapat 10 BUS yang memiliki skor pengungkapan yang sama dan menjadi yang tertinggi yaitu Bank NTB syariah, Bank Muamalat Indonesia, BRISyariah, BJB Syariah, BNI Syariah, Bank Syariah Mandiri, Bank Mega Syariah, Bank Panin Dubai Syariah, BCA Syariah dan Bank Aceh Syariah. Sementara dua BUS lainnya yaitu Bank Syariah Bukopin dan BTPN Syariah tidak memuat laporan penggunaan dana zakat dalam laporannya dikarenakan kedua BUS tersebut tidak mengelola dana zakat sendiri sehingga dalam laporan tahunannya tidak dimuat laporan penggunaan dana zakat.

3. Indikator ketiga : Keberadaan DPS sebagai pengarah syariah atas keseluruhan kegiatan operasional BUS tahun 2020.

Indikator ketiga ini merupakan indikator dengan sub indikator terbanyak diantara indikator lainnya. Hal itu karena peran krusial DPS sebagai pengawas syariah di sebuah bank syariah. DPS memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan produk/jasa dan kegiatan operasional sebuah bank syariah tetap sesuai dengan ketentuan syariah. Oleh karena itu diperlukan keterbukaan informasi yang menyangkut DPS di sebuah bank syariah. Indikator ini mengharuskan semua BUS untuk mengungkapkan profil DPS, kriteria dan ketentuan DPS, jumlah DPS, rangkap dan masa jabatan, tugas dan tanggung jawab, detail rapat, dll.

Berikut pengungkapan *shariah compliance* pada pelaksanaan GCG bank umum syariah di Indonesia tahun 2020 berdasarkan indikator ketiga.

**Tabel 4. 3Indikator Pengungkapan *Shariah Compliance* Ketiga**

No	Sub Indikator	Bank Umum Syariah											
		B N T B S	B M I S	B R I S	B J B S	B N I S	B S M	B M S	B P D S	B S B	B C A S	B T P N S	B A S
3.	17. Nama anggota DPS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	18. CV DPS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	19. Foto DPS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	20. Jumlah, kriteria, dan rangkap jabatan sesuai ketentuan RI	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	21. Usulan pengangkatan DPS oleh RUPS dan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi	0	1	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1
	22. Masa jabatan DPS	1	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1
	23. Tugas dan tanggungjawab DPS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	24. Patuh terhadap periode	0	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	0

	penyampaian laporan												
	25. Waktu penyampaian laporan	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	26. Penyediaan waktu untuk pelaksanaan tugas dan tanggungjawab	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0
	27. Jumlah rapat	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	28. Risalah rapat	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1
	29. Pengungkapan rangkap jabatan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	30. Patuh pada larangan pemanfaatan BUS untuk kepentingan pribadi	1	1	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0
	31. Pengungkapan nilai remunerasi	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	32. Patuh terhadap larangan sebagai konsultan dalam saat bersamaan	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1
	33. Opini DPS yang di <i>publish</i>	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	<b>Total</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>10</b>	<b>12</b>	<b>14</b>	<b>13</b>	<b>16</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>14</b>

Sumber : data diolah, 2021



Berdasarkan indikator ketiga yaitu keberadaan DPS sebagai pengarah syariah atas keseluruhan kegiatan operasional BUS, dapat dianalisis bahwa terdapat persamaan maupun perbedaan yang dihasilkan dari *scoring* pengungkapan indikator ketiga ini. Tidak ada dari duabelas bank umum syariah tersebut yang mengungkapkan indikator ketiga secara menyeluruh. Total skor paling tinggi hingga paling rendah yang diperoleh secara berurut adalah 16, 15, 14, 13, 12 dan 10. Sub indikator yang paling banyak tidak diungkapkan oleh BUS adalah penyediaan waktu untuk pelaksanaan tugas dan tanggungjawab, dimana ada 8 BUS yang tidak mengungkapkannya. Sub indikator lain yang jarang diungkapkan adalah patuh terhadap larangan sebagai konsultan dalam saat bersamaan, dimana ada 8 BUS yang tidak mengungkapkannya. Sementara ada 9 sub indikator yang diungkapkan oleh semua BUS.

Adapun BUS yang paling banyak mengungkapkan indikator ketiga ini adalah Bank Mega Syariah dan BCA Syariah dengan total skor yang sama yaitu 16. Kemudian disusul BTPN Syariah dengan total skor 15, dan diikuti oleh Bank NTB Syariah, Bank Muamalat Indonesia, BNI Syariah, Bank Panin Dubai Syariah, Bank Syariah Bukopin, Bank Aceh Syariah dengan total skor 14. Kemudian Bank Syariah Mandiri dengan total skor 13, BJB Syariah dengan total skor 12 dan terakhir BRISyariah dengan total skor 10.

4. Indikator keempat : Seluruh transaksi dan aktivitas ekonomi dilaporkan secara wajar sesuai dengan akuntansi syariah yang berlaku.

Pada Indikator ini, BUS harus mengungkapkan seluruh transaksi dan aktivitas ekonomi yang dilaporkan secara wajar sesuai dengan akuntansi syariah yang berlaku. Transaksi dan aktivitas ekonomi tersebut dapat dilihat dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas dan laporan penggunaan dana kebajikan. Laporan-laporan tersebut biasanya terdapat pada laporan tahunan BUS dalam bab laporan keuangan perusahaan.

Berikut pengungkapan *shariah compliance* pada pelaksanaan GCG bank umum syariah di Indonesia tahun 2020 berdasarkan indikator keempat

**Tabel 4. 4 Indikator Pengungkapan *Shariah Compliance* Keempat**

No	Sub Indikator	Bank Umum Syariah											
		B N T B S	B M I S	B R I S	B J B S	B N I S	B S M	B M S	B P D S	B S B	B C A S	B T P N S	B A S
4.	34. Neraca	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	35. Laporan Laba Rugi	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	36. Laporan Perubahan Ekuitas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	37. Laporan Penggunaan Dana Kebajikan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>

Sumber : data diolah, 2021

Berdasarkan tabel di atas, dapat dianalisis bahwa semua bank umum syariah yang diteliti telah mengungkapkan indikator ke empat dengan menyeluruh. Dapat dilihat bahwa keduabelas bank umum syariah tersebut mengungkapkan semua sub indikator yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas dan laporan penggunaan dana kebajikan, sehingga semua bank umum syariah memiliki total skor penuh yaitu 4. Semua laporan tersebut telah memenuhi aturan akuntansi

syariah yang berlaku dan seluruh transaksinya dilaporkan secara wajar serta didukung oleh adanya laporan auditor independen yang menyatakan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar.

5. Indikator kelima : Bisnis usaha yang dibiayai tidak bertentangan dengan syariah.

Pada indikator ini, BUS harus menyatakan bahwa usaha yang dibiayainya tidak bertentangan dengan prinsip syariah, diantaranya tidak mengandung *riba*, *maysir*, *gharar*, *haram* dan *dzalim*. Hal ini dinilai sangat penting karena merupakan salah satu pembeda bank syariah dengan bank konvensional. Oleh karena itu, bank syariah wajib memperhatikan kehalalan setiap produk/jasa maupun kegiatan operasionalnya.

Berikut pengungkapan *shariah compliance* pada pelaksanaan GCG bank umum syariah di Indonesia tahun 2020 berdasarkan indikator kelima.

**Tabel 4. 5 Indikator Pengungkapan *Shariah Compliance* Kelima**

No	Sub Indikator	Bank Umum Syariah											
		B N T B S	B M I S	B R I S	B J B S	B N I S	B S M S	B M S	B P D S	B S B	B C A S	B T P N S	B A S
5.	38. Tidak mengandung <i>riba</i>	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	39. Tidak mengandung <i>maysir</i>	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	40. Tidak mengandung <i>gharar</i>	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

41. Tidak mengandung <i>haram</i>	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
42. Tidak mengandung <i>dzalim</i>	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
<b>Total</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>

Sumber : data diolah, 2021

Berdasarkan tabel diatas, dapat dianalisis bahwa seluruh bank umum syariah yang diteliti telah mengungkapkan indikator ke lima dengan menyeluruh. Sehingga dapat disimpulkan bahwa aktivitas usaha yang dibiayai oleh ke-10 bank umum syariah diatas tidak bertentangan dengan prinsip syariah karena tidak mengandung *riba*, *maysir*, *gharar*, *haram* dan *dzalim*. Oleh karena seluruh sub indikator diungkapkan semua, maka semua bank umum syariah yang diteliti memiliki total skor yang sama yaitu 5.

### C. Analisis Pengungkapan *Shariah Compliance* Pada Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2020

Berdasarkan hasil *scoring* yang dilakukan terhadap lima indikator pengungkapan *shariah compliance* diatas, maka dapat diperoleh nilai *scoring* sebagai berikut:

**Tabel 4. 6 Hasil Scoring Pengungkapan *Shariah Compliance* BUS Tahun 2020**

No	Sub Indikator	Bank Umum Syariah												
		B N T B S	B M I	B R I S	B J B S	B N I S	B S M	B M S	B P D S	B S B	B C A S	B T P N S	B A S	
1.	Akad yang digunakan dalam	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	7	10

	pengumpulan dan penyaluran dana BUS tahun 2020												
2.	Pengelolaan dana zakat BUS tahun 2020	5	5	5	5	5	5	5	5	0	5	0	5
3.	Keberadaan DPS sebagai pengarah syariah atas keseluruhan kegiatan operasional BUS tahun 2020	14	14	10	12	14	13	16	14	14	16	15	14
4.	Seluruh transaksi dan aktivitas ekonomi dilaporkan secara wajar sesuai dengan akuntansi syariah yang berlaku	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5.	Bisnis usaha yang dibiayai tidak bertentangan dengan syariah	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
<b>n1</b>		<b>38</b>	<b>38</b>	<b>34</b>	<b>36</b>	<b>38</b>	<b>37</b>	<b>40</b>	<b>38</b>	<b>33</b>	<b>40</b>	<b>31</b>	<b>38</b>
<b>No</b>		<b>42</b>											

NP (%)	90	90	80	85	90	88	95	90	78	95	73	90
--------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Sumber : data diolah, 2021

Pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa bahwa semua BUS telah mengungkapkan *sharia compliance*-nya diatas 50%. Indeks pengungkapan *shariah compliance* tertinggi sebesar 95% dengan total skor pengungkapan 40 ditempati oleh 2 BUS yaitu Bank Mega Syariah dan BCA Syariah. Kemudian dibawahnya ada Bank NTB Syariah, Bank Muamalat Indonesia, BNI Syariah, Bank Panin Dubai Syariah dan Bank Aceh Syariah dengan jumlah indeks 90% dan disusul oleh Bank Syariah Mandiri 88%, BJB Syariah 85%, BRISyariah 80%, Bank Syariah Bukopin 78% dan BTPN Syariah 73%.

Penentuan predikat *shariah compliance* sendiri tidak dapat dilakukan karena penulis tidak menemukan indikator pemeringkatan pengungkapan *shariah compliance*, namun jika dilakukan penentuan predikat masing-masing BUS dengan menggunakan predikat *Islamic Social Reporting*, maka akan diperoleh predikat sebagai berikut:

**Tabel 4. 7 Predikat Pengungkapan *Sharia Compliance* (ISR) BUS Tahun 2020**

Bank Umum Syariah	Predikat	Bank Umum Syariah	Predikat
Bank NTB Syariah	Sangat Informatif	Bank Mega Syariah	Sangat Informatif
Bank Muamalat Indonesia	Sangat Informatif	Bank Panin Dubai Syariah	Sangat Informatif
BRISyariah	Informatif	Bank Syariah Bukopin	Informatif
BJB Syariah	Sangat Informatif	BCA Syariah	Sangat Informatif
BNI Syariah	Sangat Informatif	BTPN Syariah	Informatif

Bank Syariah Mandiri	Sangat Informatif	Bank Aceh Syariah	Sangat Informatif
----------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Sumber : data diolah, 2021

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa jika predikat pengungkapan *sharia compliance* ditentukan dengan menggunakan predikat *Islamic Social Reporting*, maka pengungkapan *sharia compliance* bank umum syariah yang diteliti dapat dikatakan sangat baik, karena hampir seluruh bank umum syariah sudah mendapatkan peringkat sangat informatif, yaitu 9 dari 12 BUS. Sementara 3 BUS lainnya yaitu BRISyariah, Bank Syariah Bukopin, Bank BTPN Syariah mendapat predikat informatif.

#### **D. Pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) Pada Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2020**

Pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) pada pelaksanaan *Good Corporate Governance* bank umum syariah ini diteliti dengan menggunakan indikator-indikator yang telah dimuat sebelumnya. Indikator tersebut berjumlah 6 indikator dan 43 sub indikator, dimana indikatornya yaitu pendanaan dan investasi, produk dan jasa, karyawan, masyarakat, lingkungan, dan tata kelola perusahaan.

Adapun metode yang digunakan dalam mengungkapkan *Islamic Social Reporting* (ISR) ini sama dengan *sharia compliance* yaitu metode *scoring*. Pada metode *scoring*, jika sub indikator diungkapkan dalam laporan maka akan dinilai 1 dan jika tidak diungkapkan dinilai 0. Kemudian hasil *scoring* tersebut akan dihitung dengan rumus:

$$\text{Indeks ISR} = \frac{\text{Jumlah poin yang diungkapkan} \times 100\%}{\text{Jumlah Skor Maksimal}}$$

Setelah hasil indeks ISR diperoleh, maka selanjutnya akan ditentukan predikat tingkat pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) dari masing-masing BUS. Dalam penilaian tingkat pengungkapan keduanya, diklasifikasikan dalam 4 kategori yaitu :

**Tabel 4. 8 Predikat Tingkat Pengungkapan BUS**

<b>Predikat</b>	<b>Nilai Indeks</b>
Sangat Informatif	81% - 100%
Informatif	66% -80%
Kurang Informatif	51% - 65%
Tidak Informatif	0% - 50%

Sumber : Munawaroh dalam Zanariyatim et al.

Berikut pengungkapan *Islamic Social Reporting (ISR)* pada pelaksanaan GCG bank umum syariah di Indonesia tahun 2020 berdasarkan indikator-indikator yang telah disebutkan diatas:

1. Indikator Pertama : Pendanaan dan Investasi

Indikator ini terdiri dari beberapa sub indikator yang berhubungan dengan kegiatan pembiayaan dan investasi yang dilakukan oleh BUS diantaranya adalah *riba*, *gharar*, *zakat*, kewajiban atas keterlambatan pembayaran piutang dan penghapusan piutang tak tertagih, CVBS dan VAS. *Current Value Balance Sheet (CVBS)* adalah neraca menggunakan nilai saat ini. Sementara *Value Added Statement (VAS)* adalah informasi tentang nilai tambah yang diperoleh perusahaan dalam periode tertentu. Pada penelitian ini penulis tidak mengikutsertakannya karena berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu mengungkapkan bahwa kedua sub indikator ini belum diterapkan di Indonesia.

Berikut pengungkapan *Islamic Social Reporting (ISR)* pada pelaksanaan GCG bank umum syariah di Indonesia tahun 2020 berdasarkan indikator pertama.



**Tabel 4. 9 Indikator Pengungkapan *Islamic Social Reporting (ISR)* Pertama**

No	Sub Indikator	Bank Umum Syariah											
		BNTBS	BMI	BRIS	BJBS	BNIS	BSM	BMS	BPD	BSB	BCAS	BTPS	BAS
1.	44. Riba	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	45. Gharar	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	46. Zakat ; d. Metode yang digunakan e. Jumlah zakat f. Penerima manfaat	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1
	47. Kewajiban atas keterlambatan pembayaran piutang dan penghapusan piutang tak tartagih	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>4</b>

Sumber : data diolah, 2021

Berdasarkan tabel diatas, dapat dianalisis bahwa hampir seluruh BUS yang diteliti telah mengungkapkan seluruh sub indikator pendanaan dan investasi ini. Terdapat 10 BUS yang mencapai total skor maksimal diantaranya adalah Bank NTB Syariah, Bank Muamalat Indonesia, Bank BRISyariah, BJB Syariah, BNI Syariah, Bank Syariah Mandiri, Bank Mega Syariah, Bank Panin Dubai Syariah, BCA Syariah dan Bank Aceh Syariah. Sementara 2 BUS lainnya yaitu Bank Syariah Bukopin dan

BTPN Syariah memiliki total skor 3 karena sama-sama tidak mengungkapkan laporan penggunaan dana zakat dalam laporan tahunan dan laporan GCG.

2. Indikator kedua : Produk dan Jasa

Indikator kedua ini menilai pengungkapan produk dan jasa yang dimiliki oleh BUS, seperti pengungkapan tentang produk yang ramah lingkungan, status kehalalan produk, kualitas dan keamanan produk dan keluhan konsumen.

Berikut pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) pada pelaksanaan GCG bank umum syariah di Indonesia tahun 2020 berdasarkan indikator kedua.

**Tabel 4. 10 Indikator Pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) Kedua**

No	Sub Indikator	Bank Umum Syariah											
		B N T B S	B M I	B R I S	B J B S	B N I S	B S M	B M S	B P D S	B S B	B C A S	B T P N S	B A S
2.	48. Produk yang ramah lingkungan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	49. Status kehalalan produk	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	50. Kualitas dan keamanan suatu produk	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	1
	51. Keluhan konsumen/indikator yang tidak terpenuhi dalam peraturan dan	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1

	kode sukarela (jika ada)												
<b>Total</b>		<b>3</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>4</b>

Sumber : data diolah, 2021

Berdasarkan indikator kedua yaitu produk dan jasa, dapat dianalisis bahwa terdapat 8 BUS yang memiliki total skor penuh yang artinya kedelapan BUS tersebut mengungkapkan keseluruhan sub indikator yang ada, BUS tersebut adalah Bank Muamalat Indonesia, BRISyariah, Bank Jabar Banten Syariah, BNI Syariah, Bank Syariah Mandiri, Bank Mega Syariah, BCA Syariah dan Bank Aceh Syariah. Sementara Bank NTB Syariah, Bank Panin Dubai Syariah dan BTPN Syariah memiliki total skor pengungkapan 3, sub indikator yang tidak diungkapkan adalah kualitas dan keamanan produk. Sementara Bank Syariah Bukopin memiliki total skor terendah dibandingkan BUS lainnya yaitu 2 dengan sub indikator yang tidak diungkapkan adalah kualitas dan keamanan produk serta keluhan konsumen.

### 3. Indikator ketiga : Karyawan

Indikator ketiga ini menilai pengungkapan BUS dalam memperlakukan karyawannya, mulai dari sifat pekerjaan yaitu jam kerja, liburan, manfaat, pendidikan dan pelatihan SDM, kesempatan yang sama, keterlibatan karyawan, kesehatan dan keselamatan kerja serta lingkungan kerja.

Berikut pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) pada pelaksanaan GCG bank umum syariah di Indonesia tahun 2020 berdasarkan indikator ketiga.

**Tabel 4. 11 Indikator Pengungkapan *Islamic Social Reporting (ISR)* Ketiga**

No	Sub Indikator	Bank Umum Syariah											
		B N T B S	B M I S	B R I S	B J B S	B N I S	B S M	B M S	B P D S	B S B	B C A S	B T P N S	B A S
3.	52. Sifat pekerjaan: d. Jam kerja e. Liburan f. Manfaat lain	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1
	53. Pendidikan dan pelatihan/pengembangan sumber daya manusia	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	54. Kesempatan yang sama	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	55. Keterlibatan karyawan	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0
	56. Kesehatan dan keselamatan kerja	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	57. Lingkungan kerja	0	1	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1
	58. Karyawan khusus kelompok lain (cacat, mantan narapidana, mantan pecandu narkoba)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	59. Eselon yang lebih	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

tinggi di perusahaan melakukan shalat berjamaah dengan para manajer tingkat yang lebih rendah dan menengah												
60. Karyawan muslim diizinkan untuk melakukan shalat wajib mereka selama waktu dan puasa tertentu ramadhan pada hari kerja mereka	1	1	0	1	0	1	0	0	1	0	1	1
61. Tempat yang tepat ibadah bagi karyawan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
<b>Total</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>6</b>

Sumber : data diolah, 2021

Berdasarkan tabel diatas, pada indikator ketiga ini, tidak ada BUS yang memiliki total skor yang sempurna, total skor pengungkapan paling tinggi adalah 7 yang ditempati oleh 2 BUS yaitu Bank Syariah Bukopin dan BTPN Syariah. Kemudian ada 4 BUS yang memiliki total skor paling tinggi kedua yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank Jabar Banten Syariah, Bank Syariah Mandiri dan Bank Aceh Syariah dengan total skor 6. Selanjutnya dengan total skor 5 ditempati oleh Bank NTB Syariah, BRISyariah, Bank Panin Dubai Syariah dan BCA Syariah. Sementara itu, BNI Syariah memiliki total skor 4 dan Bank Mega Syariah memiliki total skor 3.

Adapun sub indikator yang paling banyak diungkapkan oleh BUS adalah pendidikan dan pelatihan SDM, kesempatan yang sama bagi karyawan, kesehatan dan keselamatan kerja. Ada pula sub indikator yang tidak diungkapkan oleh semua BUS adalah karyawan khusus kelompok lain, petinggi perusahaan melakukan shalat berjamaah dengan para bawahan. Dapat dilihat pula pada sub indikator tempat ibadah bagi karyawan, dimana hanya ada satu BUS yang mengungkapkannya yaitu BTPN Syariah. Sementara di atasnya, yaitu sub indikator kebebasan beribadah, ada 5 BUS yang tidak mengungkapkannya, yaitu BRISyariah, BNI Syariah, Bank Mega Syariah, Bank Panin Dubai Syariah dan BCA Syariah.

#### 4. Indikator keempat : Masyarakat

Indikator ini menilai pengungkapan BUS terhadap tanggung jawab sosialnya kepada kelompok masyarakat. Ada beragam kelompok masyarakat yang menjadi sub indikator diantaranya generasi muda, anak-anak dan orang-orang kurang mampu. Selain itu dapat dilihat pula apa saja bentuk-bentuk bantuan yang dilakukan oleh BUS seperti sedekah/donasi, wakaf, qardhassan, biaya sukarela. Kemudian terdapat sub indikator mengenai tujuan bantuan tersebut, yaitu untuk pendidikan, kegiatan sosial dan kesehatan.

Berikut pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) pada pelaksanaan GCG bank umum syariah di Indonesia tahun 2020 berdasarkan indikator keempat.

**Tabel 4. 12 Indikator Pengungkapan *Islamic Social Reporting (ISR)* Keempat**

No	Sub Indikator	Bank Umum Syariah											
		B N T B S	B M I	B R I S	B J B S	B N I S	B S M	B M S	B P D S	B S B	B C A S	B T P N S	B A S
4.	62. <i>Saddaqa</i> /donasi	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1
	63. <i>Wakaf</i>	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	64. <i>Qardhassan</i>	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	65. Biaya sukarela	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	66. Pendidikan: c. Skema adopsi sekolah d. Beasiswa	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1
	67. Lulusan kerja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68. Generasi muda	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	69. Kemiskinan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1
	70. Kepedulian anak	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1
	71. Amal/hadiah/kegiatan sosial	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1
72. Mensponsori kesehatan masyarakat/proyek rekreasi/acara budaya	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

<b>Total</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>9</b>
--------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Sumber : data diolah, 2021

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa dari total 11 sub indikator yang ada, tidak ada BUS yang mencapai angka tersebut. BUS yang paling banyak mengungkapkan indikator ini adalah BNI Syariah dan Bank Aceh Syariah dengan total skor 9, kemudian disusul oleh total skor 8 yang dimiliki oleh 7 BUS yaitu Bank NTB Syariah, Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, Bank Mega Syariah, Bank Panin Dubai Syariah, Bank Syariah Bukopin dan BCA Syariah. Dibawahnya dengan total skor 7 ditempati oleh BRISyariah dan Bank Jabar Banten Syariah. Sementara BTPN Syariah memiliki total skor 4.

BTPN Syariah memiliki skor terendah karena tidak banyak mengungkapkan sub indikator yang ada, diantaranya adalah tidak mengungkapkan wakaf, biaya sukarela, pendidikan, lulusan kerja, kemiskinan, kepedulian anak dan amal/kegiatan sosial. Pengungkapan yang dilakukan BTPN Syariah terhadap indikator ini tidak mendetail/spesifik, hanya mengungkapkan sedekah/donasi, qardhassan, generasi muda dan mensponsori kesehatan masyarakat/proyek/rekreasi/acara budaya.

Sementara kebalikannya, BNI Syariah dan Bank Aceh Syariah memiliki pengungkapan yang detail pada indikator ini, keduanya hanya tidak mengungkapkan biaya sukarela dan lulusan kerja yang juga banyak tidak diungkapkan oleh BUS lainnya.

##### 5. Indikator kelima : Lingkungan

Indikator ini menilai pengungkapan tanggung jawab BUS terhadap lingkungan hidup, baik di perusahaan maupun lingkungan luar perusahaan.



Berikut pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) pada pelaksanaan GCG bank umum syariah di Indonesia tahun 2020 berdasarkan indikator kelima.

**Tabel 4. 13 Indikator Pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) Kelima**

No	Sub Indikator	Bank Umum Syariah											
		B N T B S	B M I S	B R I S	B J B S	B N I S	B S M	B M S	B P D S	B S B	B C A S	B T P N S	B A S
5.	73. Konservasi lingkungan	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1
	74. Satwa liar yang terancam punah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75. Pencemaran lingkungan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	76. Pendidikan lingkungan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	77. Produk lingkungan/proses yang terkait	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78. Audit lingkungan/ pernyataan verifikasi independen/pemerintahan	0	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1
	79. Sistem manajemen lingkungan/kebijakan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
<b>Total</b>		<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>

Sumber : data diolah, 2021

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa tidak ada BUS yang memenuhi semua sub indikator lingkungan tersebut. Pengungkapan tertinggi ditempati oleh BJB Syariah dan Bank Aceh syariah dengan total skor 4 dan diikuti oleh Bank Muamalat Indonesia, BRISyariah, BNI Syariah, Bank Syariah Mandiri, Bank Mega Syariah dan Bank Panin Dubai Syariah dengan total skor pengungkapan 3. Selanjutnya, ada Bank NTB Syariah, Bank Syariah Bukopin, BCA Syariah dan BTPN Syariah yang memiliki total skor pengungkapan 2 dengan menungkapkan sub indikator pendidikan lingkungan dan sistem manajemen lingkungan.

6. Indikator keenam : Tata Kelola Perusahaan

Indikator pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) yang terakhir adalah tata kelola perusahaan yang memiliki 5 sub indikator. BUS harus mengungkapkan status kepatuhannya terhadap prinsip-prinsip syariah dan menghindari kegiatan terlarang seperti monopoli, pembunuhan barang, manipulasi harga, penipuan dan judi. Selain itu, BUS harus mengungkapkan kebijakan anti korupsi, struktur kepemilikan saham muslim dan jumlah sahamnya serta perbandingan struktur muslim dan non-muslim.

Berikut pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) pada pelaksanaan GCG bank umum syariah di Indonesia tahun 2020 berdasarkan indikator keenam.

**Tabel 4. 14 Indikator Pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) Keenam**

No	Sub Indikator	Bank Umum Syariah											
		B N T B S	B M I	B R I S	B J B S	B N I S	B S M	B M S	B P D S	B S B	B C A S	B T P N S	B A S
6.	80. Status kepatuhan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

syariah												
81. Struktur kepemilikan: b. Jumlah pemegang saham muslim dan kepemilikan sahamnya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82. Papan struktur-muslim vs non-muslim	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83. Kegiatan terlarang: f. Praktek monopoli g. Penimbunan barang yang diperlukan h. Manipulasi harga i. Praktek bisnis penipuan j. Judi	0	1	0	0	1	1	0	1	1	1	0	0
84. Kebijakan anti korupsi	0	1	0	0	0	1	1	0	1	0	1	1
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

Sumber : data diolah, 2021

Pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa tidak ada BUS yang memiliki skor pengungkapan yang penuh. BUS yang paling tinggi skor pengungkapannya adalah Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri dan Bank Syariah Bukopin. Kemudian ada BNI Syariah, Bank Mega Syariah, Bank Panin Dubai Syariah, BCA Syariah, BTPN Syariah dan Bank Aceh Syariah dengan skor pengungkapan 2. Terakhir ada Bank NTB Syariah, BRISyariah dan Bank Jabar Banter Syariah yang memiliki skor pengungkapan terendah.

Adapun sub indikator yang tidak diungkapkan oleh semua BUS adalah struktur kepemilikan saham muslim dan struktur muslim dan non-muslim. Di dalam laporan tahunan dan laporan GCG BUS, tidak ada memuat kedua sub indikator tersebut, di dalam laporan hanya memuat struktur kepemilikan saham umum dan struktur karyawan berdasarkan jabatan, jenjang pendidikan, usia dan jenis kelamin.

**E. Analisis Pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) Pada Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2020**

Berdasarkan hasil *scoring* yang dilakukan terhadap enam indikator pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) diatas, maka dapat diperoleh nilai *scoring* sebagai berikut:

**Tabel 4. 15 Hasil Scoring Pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) BUS Tahun 2020**

No	Sub Indikator	Bank Umum Syariah											
		B N T B S	B M I	B R I S	B J B S	B N I S	B S M	B M S	B P D S	B S B	B C A S	B T P N S	B A S
1.	Pendanaan dan Investasi	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4
2.	Produk dan Jasa	3	4	4	4	4	4	4	3	2	4	3	4
3.	Karyawan	5	6	5	6	4	6	3	5	7	5	7	6
4.	Masyarakat	8	8	7	7	9	8	8	8	8	8	4	9
5.	Lingkungan	2	3	3	4	3	3	3	3	2	2	2	4
6.	Tata Kelola	1	3	1	1	2	3	2	2	3	2	2	2

	Perusahaan												
<b>Jumlah Diungkapkan</b>	<b>Poin</b>	23	28	24	26	26	28	24	25	25	25	21	29
<b>Skor Maksimal</b>		<b>41</b>											
<b>Indeks ISR</b>		56	68	58	63	63	68	58	60	60	60	51	70

Sumber : data diolah, 2020

Pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa semua BUS telah mengungkapkan *Islamic Social Reporting*-nya diatas 50%. BUS dengan indeks pengungkapan *Islamic Social Reporting* tertinggi sebesar 70% adalah Bank Aceh Syariah, kemudian diposisi kedua ada Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri yang indeks ISR-nya sebesar 68% dan disusul oleh BJB Syariah 63%, BNI Syariah 63%, Bank Panin Dubai Syariah 60%, Bank Syariah Bukopin 60%, BCA Syariah 60%, BRISyariah 58%, Bank Mega Syariah 58%, Bank NTB Syariah 56% dan yang terakhir ada BTPN Syariah 51%.

Berdasarkan hasil indeks ISR tersebut, dapat ditentukan predikat masing-masing BUS sebagai berikut :

**Tabel 4. 16 Predikat Pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) BUS Tahun 2020**

<b>Bank Umum Syariah</b>	<b>Predikat</b>	<b>Bank Umum Syariah</b>	<b>Predikat</b>
Bank NTB Syariah	Kurang Informatif	Bank Mega Syariah	Kurang Informatif
Bank Muamalat Indonesia	Informatif	Bank Panin Dubai Syariah	Kurang Informatif
BRISyariah	Kurang Informatif	Bank Syariah Bukopin	Kurang Informatif
BJB Syariah	Kurang	BCA Syariah	Kurang

	Informatif		Informatif
BNI Syariah	Kurang Informatif	BTPN Syariah	Kurang Informatif
Bank Syariah Mandiri	Informatif	Bank Aceh Syariah	Informatif

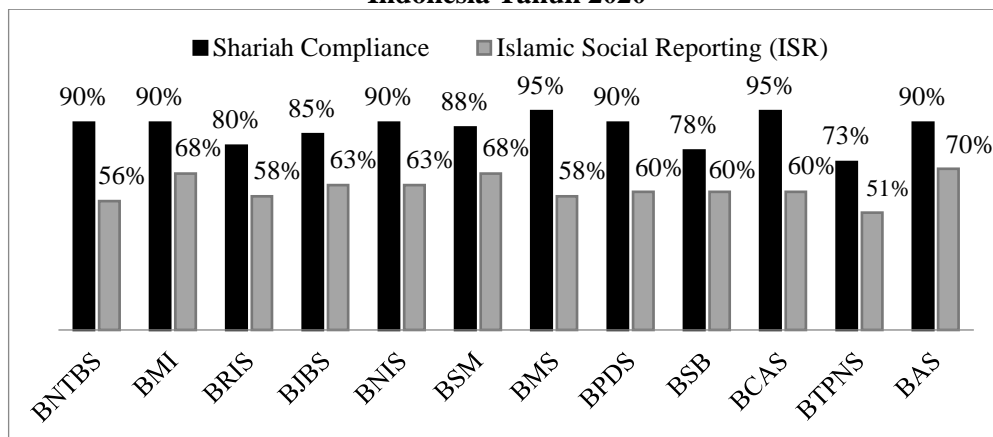
Sumber : data diolah, 2021

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa walaupun indeks ISR semua bank umum syariah sudah diatas 50%, namun berdasarkan predikat pengungkapan CSR dengan metode *Islamic Social Reporting* pada pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bank Umum Syariah tahun 2020 dapat dikatakan belum cukup baik/memuaskan, karena hampir semua BUS yang diteliti mendapatkan predikat kurang informatif, hanya 3 BUS yang mendapat predikat informatif, yaitu Bank Aceh Syariah, Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri.

#### F. Analisis Pengungkapan *Shariah Compliance* dan *Islamic Social Reporting (ISR)* Pada Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2020

Berdasarkan hasil *scoring* pengungkapan *shariah compliance* dan *Islamic Social Reporting (ISR)* yang telah diukur indeksnya masing-masing, maka dapat diperoleh hasil keduanya sebagai berikut.

**Grafik 4. 1 Tingkat Pengungkapan *Shariah Compliance* dan *Islamic Social Reporting (ISR)* Pada Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2020**



Sumber : data diolah, 2021

Dari grafik diatas, dapat dilihat bahwa tingkat pengungkapan *shariah compliance* BUS di Indonesia tahun 2020 cenderung lebih tinggi dari pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR). Perbedaan antara keduanya cukup jelas terlihat. Menurut penulis, adanya selisih yang cukup jauh diantara kedua variabel ini dikarenakan penggunaan indeks *Islamic Social Reporting* (ISR) belum masif digunakan sebagai alat ukur pengungkapan CSR dimana kebanyakan perbankan syariah masih mengacu pada *Global Reporting Initiative Index* (GRI) yang belum memuat prinsip syariah sehingga hasil yang didapatkan ketika menggunakan indeks ISR belum cukup memuaskan.

Pada pengungkapan *shariah compliance*, Bank Mega Syariah dan BCA Syariah memiliki tingkat pengungkapan paling tinggi yaitu 95%. Hal ini karena kedua bank tersebut paling banyak mengungkapkan sub indikator dari 5 indikator yang diteliti. Adapun secara keseluruhan, masing-masing bank umum syariah telah mengungkapkan *shariah compliance* dalam laporan keuangannya, meskipun tidak semua sub indikator yang terdapat dalam indikator pengungkapan *shariah compliance* di sajikan dalam laporan masing-masing bank umum syariah. Tetapi, berdasarkan hasil indeks, dapat dilihat bahwa semua bank umum syariah yang diteliti telah mengungkapkan *shariah compliance* pada pelaksanaan GCG nya dengan tingkat pengungkapan di atas 50% dan jika meminjam indikator predikat pengungkapan ISR, maka 9 dari 12 BUS mendapatkan predikat sangat informatif dan sisanya informatif.

Hasil ini menunjukkan tingginya kesadaran pihak bank untuk mengungkapkan informasi yang dibutuhkan bagi nasabah dan masyarakat terkait dengan *shariah compliance* yang merupakan identitas dan pembeda dari *Good Corporate Governance* bank konvensional yang wajib dipertahankan sebagai bukti akan kepatuhan bank syariah dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam operasionalnya serta untuk mempertahankan kepercayaan *stakeholders*.

Pada pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR), secara keseluruhan dapat dilihat bahwa tingkat pengungkapan ISR cukup jauh dibawah dari tingkat pengungkapan *shariah compliance*. Walaupun tingkat pengungkapan ISR semua BUS yang diteliti di atas 50%, namun menurut predikat ISR hasilnya kurang baik, karena hanya ada tiga BUS saja yang mendapat predikat informatif sementara sisanya mendapat predikat kurang informatif. BUS dengan tingkat pengungkapan ISR paling tinggi adalah Bank Aceh Syariah sebesar 70% karena Bank Aceh Syariah cukup banyak mengungkapkan sub indikator dari 6 indikator yang diteliti.

Hal ini menunjukkan bahwa bank umum syariah belum cukup baik dalam memenuhi indeks ISR, karena kebanyakan bank syariah masih mengacu pada GRI. Menurut penulis, sebaiknya pihak bank syariah mulai mempertimbangkan untuk menggunakan indeks ISR dalam pelaporan CSR masing-masing perusahaan karena bank syariah akan lebih sesuai dengan indeks ISR yang setiap indikatornya mengacu pada prinsip syariah. Hasil ISR bank umum syariah yang baik akan berdampak pada banyak aspek salah satunya reputasi dan kepercayaan nasabah dan masyarakat. Karena *Corporate Social Responsibility* atau tanggung jawab sosial berorientasi kepada *stakeholders* dan berkaitan erat dengan pelaksanaan *Good Corporate Governance* yang mana salah satu prinsip dari empat prinsip utama GCG yaitu *responsibility*.

Keterbatasan penelitian ini hanya menggunakan data laporan tahunan dan laporan CSR dalam periode satu tahun yaitu tahun 2020, sehingga penulis tidak dapat menjamin apakah *shariah compliance* dan *Corporate Social Responsibility* yang telah disajikan dalam laporan telah direalisasikan semuanya dalam kegiatan operasional yang sesuai dengan aturan prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini hanya mengandalkan informasi yang tersedia dalam laporan tahunan dan laporan CSR saja, sehingga segala keputusan penilaian dapat dikatakan memiliki subjektifitas yang tinggi, karena sepenuhnya bergantung pada penilaian peneliti serta situasi dan kondisi ketika penelitian ini dilakukan.